



International
Labour
Organization

Accelerator
Lab 8.7



8.7 Accelerator Lab

Capaian & rencana kegiatan tahun 2022

Muhamad Nour, Indonesia Programme Coordinator, muhamad@ilo.org

Alix Nasri, Global Programme Manager, nasri@ilo.org



Konteks

Estimasi terbaru ILO terkait kerja paksa dan pekerja anak menunjukkan perlu ada upaya berarti jika ingin SDG target 8.7 tercapai

Ini artinya ada kebutuhan untuk **mempercepat perubahan**, khususnya akibat dampak COVID-19 yang merugikan dan pemulihan yang tidak merata dari pandemi ini terkait dengan prioritas SDG misalnya memerangi perubahan iklim

▶ 40.3
million

ILO & Walk Free Global Estimates of Modern Slavery 2017

▶ 160
million

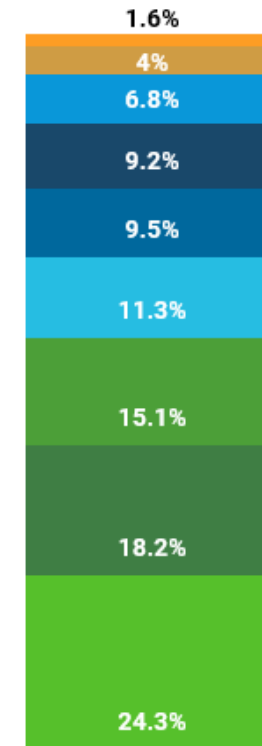
ILO and UNICEF Child Labour Estimates 2021



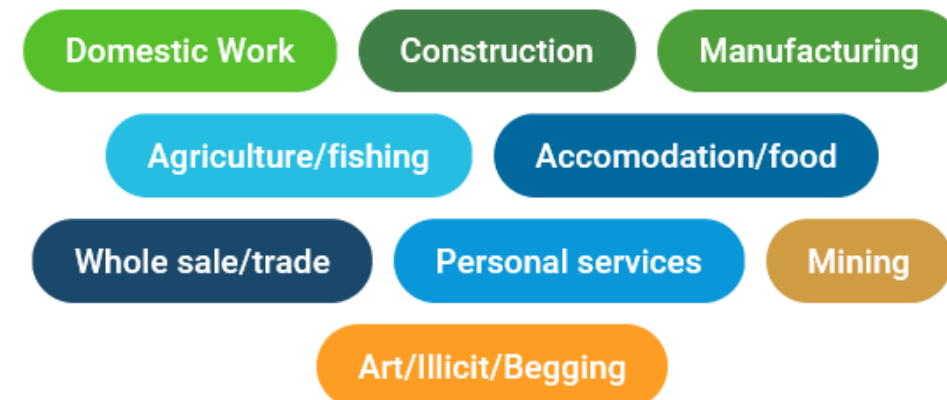
8.4
million

▶ Saat ini, sekitar **16 juta orang** di seluruh dunia merupakan korban eksploitasi kerja paksa di sektor swasta.

PERIKANAN: merupakan salah satu sektor dengan angka prevelansi kerja paksa di seluruh dunia (*Global Estimate 2017*)



Exploitation by economic activity



Apa itu 8.7 Accelerator Lab?

The Accelerator Lab merupakan sebuah initiative ILO untuk mempercepat kemajuan membasmi kerja paksa dan menghapus pekerja anak dengan mengoptimalkan kontribusi mitra termasuk melalui **dana gabungan multi donor**.

Percepatan akan dicapai dengan fokus pada 6 factor percepatan yang merupakan inti dari program Accelerator Lab.

Negara mitra untuk tahap awal Accelerator Lab dengan focus sektor perikanan ini adalah **Indonesia, Afrika Selatan dan Ghana**.



\$50 million funding objective for 2030

Funding partners already supporting the 8.7 Accelerator Lab include **NORAD, BMZ, Global Canada and USDOL**.

► Tujuan dari Accelerator Lab di Indonesia

- Meningkatnya kerangka hukum dan kebijakan untuk mencegah, mengidentifikasi dan mengatasi kerja paksa di sektor perikanan dan untuk melindungi korban termasuk penegakan hukum nya.
- Serikat pekerja dan pengusaha diperkuat untuk turut serta dan mengadopsi solusi untuk mencegah, mengidentifikasi dan mengatasi kerja paksa di sektor perikanan.

► Meningkatnya kerangka hukum dan kebijakan untuk mencegah, mengidentifikasi dan mengatasi kerja paksa di sektor perikanan dan untuk melindungi korban termasuk penegakan hukumnya

► Meningkatkan kerangka hukum dan kebijakan untuk memastikan kerja paksa bisa dicegah dan ditujukan pada sektor perikanan

Capaian & rencana kegiatan tahun 2022:

- Mengadakan konsultasi untuk mempromosikan ratifikasi ILO Protokol 29 dan mendukung pelaporan Deklarasi ILO 1998 tentang hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar di tempat kerja
 - 2022: bersama dengan pemerintah, melakukan analisis kesenjangan hukum dengan membandingkan Protocol 29.
- Berkolaborasi dengan Ship to Shore Rights Project ILO, mendukung pembentukan tim harmonisasi dan implementasi kebijakan antar kementerian di sektor perikanan.
 - 2022: mendukung fasilitasi beberapa pertemuan teknis tim harmonisasi antar kementerian, memberikan masukan kebijakan hukum untuk pembaharuan legislasi.
- Melakukan konsultasi dengan pemerintah, mitra sosial dan LSM untuk mengumpulkan data factsheet terkait kerja paksa di sektor perikanan di Indonesia, termasuk rekomendasi untuk tindakan prioritas dimana Accelerator Lab bisa dukung.
 - 2022: Menerbitkan factsheet dan menggunakannya untuk bahan masukan untuk kebijakan pada tim koordinasi antar kementerian

Memastikan implementasi yang efektif dari kerangka hukum tentang pekerjaan yang layak dalam sektor perikanan dan pencegahan kerja paksa

- Melakukan serangkaian konsultasi dengan perwakilan Regional Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated (RPOA-IUU) Asia Tenggara, yang sekretariatnya ada di KKP dan Direktorat Sumber Daya Ikan DJPT terkait progress diskusi intersessional meningkatkan standar tenaga kerja bagi awak kapal di kapal penangkap ikan di WCPFC.
 - ▶ 2022: Melakukan konsultasi dengan KKP dan Kemnaker untuk menjajaki kemungkinan mengenalkan tindakan konservasi dan pengelolaan (CMM) yang sama terkait hak pekerja nelayan di IOTC.
- Melakukan riset deteksi kerja paksa di kapal ikan untuk melengkapi toolkit ILO yang ditujukan untuk penegakan hukum bagaimana mendeteksi adanya kerja paksa di kapal ikan.
 - ▶ 2022: memaparkan temuan tersebut pada pertemuan tripartite dan mengujicobakan alat tersebut pada aparat penegak hukum Indonesia.
- Melakukan konsultasi dengan KKP (pengawas perikanan dan syahbandar) dan Kemnaker (Dirjen Binwasnaker dan K3 serta pengawas ketenagakerjaan) untuk merancang uji coba pengawasan ketenagakerjaan bersama agar penegakan aturan berjalan efektif.
 - ▶ 2022: Finalisasi kerangka acuan untuk mengimplementasikan 3 uji coba pengawasan ketenagakerjaan di lokasi yang disarankan dan langkah-langkah atau mekanisme inspeksi.

- ▶ Serikat pekerja dan pengusaha diperkuat untuk turut serta dan mengadopsi solusi untuk mencegah, mengidentifikasi dan mengatasi kerja paksa di sektor perikanan.

Memberdayakan dan mendukung serikat pekerja

- Mengadakan 3 lokakarya bersama serikat pekerja untuk memetakan aktifitas mereka di sektor perikanan dan tantangan terkait dialog sosial, pengorganisasian, perundingan bersama, penanganan pengaduan, dan advokasi. Hasil lokakarya ini diantaranya:
 - Pemetaan inisiatif serikat pekerja untuk mendorong kondisi kerja layak di sektor perikanan.
 - Mendukung pembentukan jejaring serikat pekerja untuk meraih SDG Target 8.7 di sektor perikanan.
 - Identifikasi inisiatif serikat pekerja untuk meningkatkan penjangkauan.
- 2022: Pengembangan peta jalan jejaring serikat pekerja untuk meraih SDG Target 8.7 di sektor perikanan dan mendukung inisiatif prioritas serikat pekerja.



► Mendukung Asosiasi Pengusaha dan Sekolah Bisnies

- Melakukan konsultasi dengan APINDO, ASTUIN dan ISMAA untuk memetakan inisiatif sektor swasta dan identifikasi bagaimana cara meningkatkan praktik baik, termasuk perekrutan yang adil bagi pekerja nelayan dan upaya perbaikan oleh pemberi kerja.
- Melakukan konsultasi dan membuat kesepakatan kemitraan dengan SDG Centre Institut Teknologi Surabaya, SDG Centre Universitas Kaltara, dan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo, Kaltara.
- 2022: Melakukan kursus/studi kasus pencegahan dan memaparkan kerja paksa di sektor perikanan di universitas tersebut diatas dan juga saat ini melakukan peninjauan dengan universitas yang lain seperti Fakultas Ekonomis Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.



► Kemitraan dengan media dan sekolah jurnalistik

- Mengidentifikasi pelatih media dan melakukan ToT bersama jurnalis profesional yang berpengalaman pada pelaporan di sektor perikanan.
- Melakukan konsultasi dan identifikasi kemitraan dengan departemen jurnalistik dan komunikasi Universitas Islam Bandung, Universitas Brawijaya Malang, and Universitas Diponegoro Semarang.
- 2022: Finalisasi Modul ILO mengenai pelaporan kerja paksa di sektor perikanan, membuat materi pelatihan untuk jurnalis pelajar untuk di 3 universitas diatas.



Mendukung organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya perlindungan yang sesuai bagi korban dan membuat mekanisme pencegahan yang efektif

- Melakukan serangkaian konsultasi dan pemetaan actor masyarakat sipil yang terlibat dalam promosi kerja layak bagi nelayan dan perlindungan korban kerja paksa di sektor perikanan.
- Menjajaki kemungkinan replikasi Migrant Worker Resource Centre di propinsi asal nelayan (migran)
- Memetakan mekanisme pengaduan yang ada yang dijalankan oleh masyarakat sipil dan fishers' centres
 - 2022: Melakukan kampanye publik kerja layak bagi nelayan Indonesia, bersama dengan masyarakat sipil, mitra sosial dan pemerintah; mendirikan Migrant Worker Resource Centre yang baru di propinsi asal nelayan (migran).

▶ **Pertanyaan dan komentar?**

Terima kasih!

Muhamad Nour
National Programme Coordinator
8.7 Accelerator Lab Programme
HP. 08111808332
Email: muhamad@ilo.org

